

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
31/Pdt.G/2024/ PN Bgr)**

Oleh

**Nelfa Riana Putri
NIM. 2205040084**

ABSTRAK

Penolakan tuntutan ganti rugi dalam perkara wanprestasi sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika pengadilan telah menyatakan adanya wanprestasi, tetapi tidak mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bgr yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), namun menolak sebagian tuntutan ganti rugi karena tidak dicantumkan secara tegas dalam PPJB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan ganti rugi serta menganalisis penerapan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap tuntutan ganti rugi yang tidak dicantumkan dalam PPJB. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan doktrin *ratio decidendi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada terbuktinya wanprestasi serta tidak adanya klausul ganti rugi dalam PPJB sebagai dasar penolakan sebagian tuntutan ganti rugi. Selain itu, penerapan Pasal 1243 KUHPdata dalam putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai ganti rugi dalam KUHPdata karena belum menguraikan keterkaitan Pasal 1243, Pasal 1246, Pasal 1247, Pasal 1248, dan Pasal 1250 KUHPdata. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim seharusnya tidak memperhatikan pembuktian wanprestasi, kerugian nyata, hubungan kausal, dan ketentuan ganti rugi dalam KUHPdata. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademis maupun praktis dalam penyelesaian perkara wanprestasi yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Indonesia.

Kata kunci: Wanprestasi; Ganti Rugi; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Pertimbangan Hakim; Pasal 1243 KUHPdata.

**ANALYSIS OF JUDICIAL REASONING ON THE REJECTION OF
CLAIMS FOR DAMAGES IN A BREACH OF CONTRACT CASE UNDER
A SALE AND PURCHASE BINDING AGREEMENT (A STUDY OF
DECISION NUMBER 31/Pdt.G.2024PN Bgr)**

By
Nelfa Riana Putri
NIM. 2205040084

ABSTRACT

The rejection of claims for damages in breach of contract cases often gives rise to legal issues, particularly when a court declares that a breach of contract has occurred but does not grant all claims for damages submitted by the injured party. This issue is reflected in the Decision of the Bogor District Court Number 31/Pdt.G/2024/PN Bgr, which declared that the Defendant had committed a breach of contract under the Sale and Purchase Binding Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli or PPJB) but rejected part of the Plaintiff's claim for damages because such damages were not expressly stipulated in the PPJB. This study aims to analyze the judge's legal reasoning in rejecting the claim for damages and to examine the application of Article 1243 of the Indonesian Civil Code to claims for damages not stipulated in the PPJB. This research is normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using the theories of legal certainty, legal discovery (rechtsvinding), and the doctrine of ratio decidendi. The results show that the Panel of Judges based its reasoning on the proven breach of contract and the absence of a damages clause in the PPJB as the basis for rejecting part of the damages claimed. Furthermore, the application of Article 1243 of the Indonesian Civil Code has not been fully consistent with the provisions governing damages because it did not comprehensively explain the relationship between Articles 1243, 1246, 1247, 1248, and 1250 of the Indonesian Civil Code. This study is expected to serve as an academic and practical reference for resolving breach of contract disputes involving claims for damages arising from Sale and Purchase Binding Agreements in Indonesia.

Keywords: Breach of Contract, Damages, Sale and Purchase Binding Agreement, Judicial Reasoning, Article 1243 of the Indonesia Civil Code..